

Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

KOMINFO next

Edisi 56
Agustus 2023



DIRGAHAYU



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
MAJU

MERDEKA INDONESIA,
MENUJU KEDAULATAN RUANG DIGITAL

TIM REDAKSI

Pengarah:
Mira Tayyiba

Pemimpin Redaksi:
Rhina Anita

Wakil Pemimpin Redaksi:
Daoni Diani Hutabarat

Redaktur Pelaksana:
Helmi Fajar Andrianto

**Wakil Redaktur
Pelaksana:**
Viskayanesya

Redaktur:
M. Taufiq Hidayat
Verawati
Annisa Bonita P.

Reporter:
Yusuf
Ahmad Irso Kubangun
Meita Pusparini
Desideramus Bitan
Emild Kadju

Fotografer:
Agus Yudi Harsono
Doni Paulus Sumule
Sri Indrati Novinarsari
Indra Kusuma

Desain & Layout:
Adista Winda Rizka
Rahma Aulia Indroputri
Dhenty Febrina Sahara
Annas Yudistira Saputra

Produksi:
Fahmie Trihatin J.

Alamat Redaksi:
Biro Humas Kementerian
Komunikasi dan Informatika
Jl. Medan Merdeka Barat
No. 9, Jakarta Pusat

Merayakan Momen Sejarah: Peran Telekomunikasi dalam Kemerdekaan RI

Bulan Agustus setiap tahunnya, seluruh tanah air Indonesia merayakan momen bersejarah yang telah mengukir kemerdekaan bangsa kita. Bagi seluruh rakyat Indonesia, HUT RI bukanlah sekadar perayaan. Hari kemerdekaan adalah salah satu momen paling penting dalam sejarah suatu bangsa. Ia adalah momen yang melambungkan tekad, perjuangan, dan semangat tanpa batas untuk mencapai kemerdekaan dan kedaulatan.

Dalam edisi bulan ini, kami mengangkat tema HUT ke-78 RI untuk merayakan perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Kami juga mengupas satu aspek penting yang mungkin sering terlupakan dalam sejarah perjuangan kita: peran radio dan telekomunikasi.

Radio dan telekomunikasi adalah dua kekuatan tak terpisahkan dalam membentuk perjalanan kemerdekaan Indonesia. Lewat pesan-pesan yang disiarkan melalui radio hingga perkembangan infrastruktur telekomunikasi yang mendukung mobilitas pasukan dan komunikasi antarwilayah, teknologi telah membantu mengkoordinasikan perjuangan, menyebarkan informasi, dan menjaga semangat perlawanan hidup.



Rhina Anita

Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Pemimpin Redaksi Majalah Kominfo Next

Edisi ini adalah upaya kami untuk merayakan momen bersejarah tersebut, sekaligus mengapresiasi peran radio dan telekomunikasi dalam perjuangan mempertahankan dan meraih kemerdekaan Indonesia.

Dalam edisi KoinfoNext kali ini, pembaca akan diberikan gambaran lengkap mengenai sejarah, perkembangan, dan dampak positif dari perangkat komunikasi, seperti radio, yang digunakan oleh para pahlawan kemerdekaan untuk menyebarkan pesan dan berkomunikasi selama perjuangan melawan penjajah. Edisi ini juga akan menyoroti bagaimana perkembangan teknologi telekomunikasi telah membantu memperkuat koneksi antarwilayah di Indonesia dan mendukung proses pembangunan bangsa.

Kami harap edisi kali ini dapat memberikan wawasan baru dan menginspirasi pembaca, terutama generasi muda, untuk menghargai dan memahami bagaimana perangkat komunikasi telah menjadi salah satu pilar penting dalam meraih kemerdekaan dan membangun bangsa.

Selamat membaca!

Edisi ini adalah upaya kami untuk merayakan momen bersejarah tersebut, sekaligus mengapresiasi peran radio dan telekomunikasi dalam perjuangan mempertahankan dan meraih kemerdekaan Indonesia.

Pidato Presiden Joko Widodo
pada Sidang Tahunan MPR RI dan
Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI
dalam rangka HUT Ke-78 Proklamasi
Kemerdekaan RI

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Selamat pagi,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om Swastyastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. (H.C.) KH Ma'ruf Amin beserta Ibu Hj. Wury Estu Ma'ruf Amin;

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara;



Yang saya hormati Ibu Prof. Dr. (H.C.). Hj. Megawati Soekarnoputri, Presiden Kelima Republik Indonesia;

Yang saya hormati Bapak Jenderal (Purn.) TNI Try Sutrisno dan Bapak H. Hamzah Haz;

Yang saya hormati Bapak H. Muhammad Jusuf Kalla beserta Ibu Hj. Mufidah Jusuf Kalla;

Yang saya hormati Ibu Hj. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid;

Yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar Negara-Negara Sahabat dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional;

Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri, serta KaBIN;

Yang saya hormati, para Ketua Umum Partai Politik;

Bapak-Ibu, Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Para hadirin yang saya muliakan.

Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren di kalangan politisi dan partai politik, setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya, "Belum ada arahan dari Pak Lurah."

Saya sempat berpikir, siapa ini "Pak Lurah". Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu, yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah, saya Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode.

Tapi, perlu saya tegaskan. Saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi parpol. Sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan, itu bukan wewenang saya. Bukan wewenang Pak Lurah. Bukan wewenang Pak Lurah, sekali lagi.

Walaupun saya paham, ini sudah nasib seorang Presiden untuk dijadikan paten-patenan [Bahasa Jawa], dijadikan alibi, dijadikan tameng. Bahkan, walau kampanye belum mulai, foto saya banyak

dipasang di mana-mana. Saya harus ngomong apa adanya. Saya ke Provinsi A, ada, ke Kota B, ada, ke Kabupaten C, ada juga. Sampai ke tikungan-tikungan desa, ada juga. Tapi, bukan foto saya sendirian. Ada di sebelahnya bareng Capres. Ya, saya kira menurut saya juga tidak apa-apa. Boleh-boleh saja.

Bapak, Ibu yang saya muliakan,

Posisi Presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban. Banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan.

Dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada Presiden, mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan, bahkan makian dan fitnahan bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial.

Saya tahu, ada yang mengatakan saya ini bodoh, plonga-plongo, tidak tahu apa-apa, Firaun, tolol.

Ya, ndak apa-apa. Sebagai pribadi, saya menerima saja. Tapi, yang membuat saya sedih, budaya santun dan budi pekerti luhur bangsa ini tampak mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, sekali lagi, polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia.

Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045.

Ini yang bolak-balik saya sampaikan di setiap kesempatan. Bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045, meraih posisi menjadi negara 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan.

Tidak hanya peluang saja, tapi strategi untuk meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju, atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur.

Bapak, Ibu, Saudara-saudara se-Bangsa & se-Tanah Air,

Para hadirin yang saya muliakan,

Bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia Emas 2045. Enam puluh delapan persen adalah penduduk usia produktif. Di sinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita.

Selanjutnya, peluang besar yang kedua adalah international trust yang dimiliki Indonesia saat ini, yang dibangun bukan sekadar melalui gimmick dan retorika semata, melainkan melalui sebuah peran dan bukti nyata keberanian Indonesia dalam bersikap.



Momentum Presidensi Indonesia di G20, Keketuaan Indonesia di ASEAN, konsistensi Indonesia dalam menjunjung HAM, kemanusiaan, dan kesetaraan, serta kesuksesan Indonesia menghadapi krisis dunia 3 tahun terakhir ini, telah mendongkrak dan menempatkan Indonesia kembali dalam peta percaturan dunia.

Dan, di tengah kondisi dunia yang bergolak akibat perbedaan, Indonesia dengan Pancasila-nya, dengan harmoni keberagamannya, dengan prinsip demokrasinya, mampu menghadirkan ruang dialog, mampu menjadi titik temu, dan menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada.

Lembaga think tank Australia, Lowy Institute, menyebut Indonesia sebagai middle power in Asia, dengan diplomatic influence yang terus meningkat tajam. Dan, Indonesia termasuk 1 dari 6 negara Asia yang mengalami kenaikan comprehensive power.

Tapi kemudian ada yang bilang, memang kenapa dengan international trust yang tinggi. Rakyat kan makannya nasi. International trust tidak bisa dimakan. Ya memang tidak bisa. Sama seperti jalan tol, tidak bisa dimakan, ya memang. Nah, ini contoh menghabiskan energi untuk hal tidak produktif. Tapi tidak apa-apa, saya malah senang. Memang harus ada yang begini-begini, supaya lebih berwarna, supaya tidak monoton dunia ini.

Bapak, Ibu yang saya muliakan,

Dengan international trust yang tinggi, kredibilitas kita akan lebih diakui, kedaulatan kita akan lebih dihormati. Suara Indonesia akan lebih didengar sehingga memudahkan kita dalam setiap bernegosiasi.

Peluang tersebut harus mampu kita manfaatkan. Rugi besar kita jika melewatkan kesempatan ini, karena tidak semua negara memilikinya dan belum tentu kita akan kembali memilikinya.

Sehingga, strategi pertama untuk memanfaatkan kesempatan ini adalah mempersiapkan Sumber Daya Manusia Indonesia. Kita telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6% di 2022 dari angka sebelumnya 37%, menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9 di 2022. Kita juga telah meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,5 di 2022, menyiapkan anggaran perlindungan sosial, kalau dijumlah dari tahun 2015 sampai tahun 2023 total sebesar Rp3.212 triliun, termasuk di dalamnya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, serta reskilling dan upskilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan Program Kartu Pra-Kerja.

Di saat yang sama, SDM yang telah kita persiapkan harus mendapatkan lapangan kerja untuk menghasilkan produktivitas nasional. Sehingga, kita juga harus mengembangkan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, yang memberikan nilai tambah sebesar-besarnya.

Di sinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window of opportunity kita untuk meraih

kemajuan, karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan.

Tapi, kaya sumber daya alam (SDA) saja tidak cukup. Jadi pemilik saja juga tidak cukup. Karena itu akan membuat kita menjadi bangsa pemalas, yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya tanpa ada nilai tambah, tanpa ada keberlanjutan.

Saya ingin tegaskan, Indonesia tidak boleh seperti itu. Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah, dan menyejahterakan rakyatnya. Dan, ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi, yang sudah ratusan kali saya sampaikan, puluhan kali saya sampaikan.

Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi, yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisir dampak lingkungan. Pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang sekarang ini untuk membangun pusat pembibitan, membangun pusat persemaian untuk menghutankan kembali lahan pascatambang,



pascapenambangan. Hilirisasi yang kita lakukan tidak hanya pada komoditas mineral, tapi juga non-mineral, seperti sawit, rumput laut, kelapa, dan komoditas-komoditas potensial lainnya yang mengoptimalkan kandungan lokal, yang bermitra dengan UMKM, bermitra dengan petani, dan bermitra dengan nelayan, sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil.

Upaya ini sedang kita lakukan dan harus terus dilanjutkan. Ini memang pahit bagi pengeksportor bahan mentah. Ini juga mungkin pahit bagi pendapatan negara jangka pendek. Tapi jika ekosistem besarnya sudah terbentuk, jika pabrik pengolahannya sudah beroperasi, saya pastikan ini akan berbuah manis pada akhirnya, terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sebagai gambaran, setelah kita stop ekspor nikel ore di tahun 2020, investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat. Kini telah ada 43 industri pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar. Ini baru satu komoditas.

Dan, jika kita konsisten dan mampu melakukan hilirisasi untuk nikel, kemudian tembaga, kemudian bauksit, kemudian CPO, dan rumput laut, dan yang

lain-lainnya, berdasar hitung-hitungan perkiraan dalam 10 tahun pendapatan per kapita kita, dalam 10 tahun mendatang pendapatan per kapita kita akan mencapai Rp153 juta (USD10,900). Dalam 15 tahun, pendapatan per kapita kita akan mencapai Rp217 juta (USD15,800). Dan, dalam 22 tahun, pendapatan per kapita kita, akan mencapai Rp331 juta (USD25,000). Sebagai perbandingan, tahun 2022 kemarin kita berada di angka Rp71 juta. Artinya, dalam 10 tahun lompatannya bisa lebih dari 2 kali lipat lebih.

Di mana pondasi untuk menggapai itu semua sudah kita mulai. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang pada akhirnya menaikkan daya saing kita. Kita tahu berdasarkan International Institute for Management Development, daya saing kita pada 2022 naik dari ranking 44 menjadi 34. Kenaikan ini merupakan kenaikan tertinggi di dunia.

Pembangunan dari desa, pinggiran, dan daerah terluar yang pada akhirnya pemeratakan ekonomi kita, dengan Dana Desa yang kita gelontorkan mencapai Rp539 triliun dari tahun 2015 sampai tahun 2023.

Konsistensi reformasi struktural, terutama sinkronisasi dan penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi. Semua itu menjadi modalitas kita untuk meraih kemajuan.

Oleh sebab itu, saya berulang kali menyampaikan, kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia.

Ini bukan tentang siapa yang jadi presidennya. Bukan, bukan itu, bukan itu. Tapi, apakah sanggup atau tidak untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah kita mulai saat ini, apakah berani atau tidak, mampu konsisten atau tidak. Karena yang dibutuhkan adalah napas yang panjang. Karena kita tidak sedang jalan sore. Kita juga tidak sedang lari sprint. Tapi yang kita lakukan harusnya adalah lari maraton untuk mencapai Indonesia Emas.

Bapak, Ibu yang saya muliakan,

Tantangan ke depan tidaklah mudah. Pilihan kebijakan akan semakin sulit sehingga dibutuhkan



keberanian, dibutuhkan kepercayaan untuk mengambil keputusan yang sulit dan keputusan yang tidak populer.

Oleh sebab itu, menurut saya, pemimpin itu harus punya public trust, karena kepercayaan adalah salah satu faktor penentu bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, bisa diikuti atau tidaknya sebuah keputusan. Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa besar seperti Indonesia.

Selain itu, seorang pemimpin juga membutuhkan dukungan dan kerja sama dari seluruh komponen bangsa. Oleh sebab itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, para ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, dan para pemimpin adat, kepada guru, budayawan, tenaga kesehatan, dan awak media, partai politik, politisi, aparat pemerintah, dan TNI/Polri, serta kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan dukungan selama ini.

Saya juga menghargai upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam memperkokoh fondasi kebangsaan, meningkatkan pemahaman ideologi bangsa, mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok haluan negara, serta menguatkan kerja sama internasional untuk berkontribusi pada pemecahan persoalan global.

Dukungan Dewan Perwakilan Rakyat juga sangat luar biasa besar dalam mendukung reformasi struktural, mendukung upaya perbaikan tata kelola pemerintahan, menghindari penyelewengan pengelolaan keuangan negara, dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024.

Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan kewenangannya juga telah aktif menyerap aspirasi masyarakat daerah, berperan dalam penyusunan beberapa RUU, dan juga melakukan telaah terhadap sistem tata negara kita.

Kontribusi Badan Pemeriksa Keuangan juga sangat signifikan dalam mendorong pertanggungjawaban anggaran serta perbaikan berkelanjutan Program Prioritas Nasional.

Upaya Mahkamah Agung dalam menciptakan keadilan patut diapresiasi melalui peningkatan

transparansi peradilan, pengembangan sistem peradilan berbasis elektronik, serta percepatan proses penanganan perkara dengan biaya murah.

Mahkamah Konstitusi juga terbukti semakin cepat dalam menyelesaikan perkara, transparansi dalam proses persidangannya, dan mempermudah pelayanan para pencari keadilan.

Komisi Yudisial terus aktif melakukan advokasi, pelatihan, dan investigasi, menjatuhkan sanksi tegas terhadap hakim yang melanggar untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.

Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman RI, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Komnas HAM, dan lembaga-lembaga nasional lainnya yang telah berkontribusi sesuai peran dan kewenangannya.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa mempermudah upaya kita dalam meraih Indonesia Maju yang kita cita-citakan. Marilah kita bersatu padu, Terus Melaju untuk Indonesia Maju.





**Dirgahayu Republik Indonesia!
Dirgahayu Negeri Pancasila!
Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Terima kasih.**

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi
Wabarakaatuh.

Om Shanti Shanti Shanti Om, Namu Buddhaya.

Untuk informasi, yang saya pakai ini adalah baju
adat dari Tanimbar, Provinsi Maluku.

Jakarta, 16 Agustus 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

JOKO WIDODO



Pidato Presiden Joko Widodo pada
Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas
RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024
Beserta Nota Keuangannya

Bismillahirrahmaanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. (H.C.)
K.H. Ma'ruf Amin.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Lembaga-Lembaga Negara.

Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung,
Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Lembaga Pemerintahan.

Hadirin sekalian yang saya hormati, serta Saudara-saudara se-Bangsa dan
se-Tanah Air.

Dalam tiga tahun terakhir, dunia dihadapkan pada guncangan pandemi Covid-19 yang menelan korban 6,9 juta manusia. Alhamdulillah, negara kita, Indonesia, telah berhasil menghadapi tantangan besar tersebut, akibat pandemi dengan hasil yang sangat baik. Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil menangani krisis kesehatan, memulihkan ekonomi dengan cepat dan baik.

Dan pertumbuhan ekonomi selama tujuh kuartal terakhir secara konsisten berada di atas 5 persen. Tingkat pengangguran berhasil diturunkan dari 6,26 persen pada Februari 2021 menjadi 5,45 persen pada Februari 2023.

Sementara, tingkat kemiskinan juga terus menurun menjadi 9,36 persen pada Maret 2023. Begitu juga dengan kemiskinan ekstrim yang turun dari 2,04 persen pada Maret 2022 menjadi 1,12 persen pada Maret 2023.

Pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat telah membawa Indonesia naik kelas, masuk kembali ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas di tahun 2022.

Pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut. Semester-1 2023, ekonomi nasional tumbuh 5,1 persen. Inflasi Indonesia juga semakin terkendali dan mencapai 3,1 persen sampai dengan Juli 2023.

Kebijakan fiskal Indonesia termasuk salah satu yang paling efektif dalam menangani pandemi dan menjaga pertumbuhan ekonomi.

Defisit fiskal Indonesia sudah kembali di bawah 3 persen PDB, satu tahun lebih cepat dari rencana awal. Rasio utang Indonesia juga salah satu yang paling rendah dibanding kelompok negara-negara G-20 dan ASEAN, bahkan sudah menurun dari 40,7 persen PDB di tahun 2021 menjadi 37,8 persen per Juli 2023.

Sebagai perbandingan, rasio utang Malaysia saat ini di tingkat 66,3 persen PDB, Tiongkok 77,1 persen, dan India 83,1 persen.

Hadirin yang saya hormati, Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,



Kita menyaksikan perubahan lanskap global yang sangat cepat, khususnya karena pergeseran geopolitik. Fragmentasi global menciptakan disrupsi rantai pasok yang meningkatkan risiko pangan, risiko krisis pangan, energi, serta keuangan dunia.

Konstelasi global harus disikapi dengan strategi kebijakan yang jitu dan antisipatif. Kebijakan ekonomi dan fiskal harus mampu mentransformasi ekonomi untuk menghadapi tantangan hari ini dan hari depan.

Ketahanan pangan dan energi serta transformasi manufaktur menjadi sangat penting. Di sisi lain, industri pertahanan harus dibangun secara kompetitif untuk menjawab kebutuhan pertahanan keamanan Indonesia.

Dunia juga dihadapkan pada potensi krisis akibat perubahan iklim. Transisi penggunaan energi juga perlu dilaksanakan secara progresif, namun tetap adil dan terjangkau. Potensi nilai ekonomi hayati Indonesia harus kita manfaatkan sebagai faktor penting dalam mengembangkan dan meningkatkan investasi ekonomi hijau di dalam negeri.

Selain itu, perkembangan digitalisasi dan artificial intelligent diperkirakan akan mendominasi

kehidupan perekonomian dunia, termasuk di Indonesia. Disrupsi ini harus dihadapi dengan strategi yang tepat. Pembangunan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur fisik dan non fisik terkait dengan teknologi informasi harus ditingkatkan.

Struktur penduduk muda akibat bonus demografi akibat bonus demografi, kita manfaatkan secara maksimal. Transformasi ekonomi terus dilanjutkan untuk meningkatkan daya tarik investasi dan pembukaan lapangan kerja yang layak secara masif.

Partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global, khususnya pada sektor berteknologi tinggi dan ramah lingkungan, harus terus kita didorong.

Perbaikan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama transformasi ekonomi. Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, produktif, dan inovatif juga menjamin inklusivitas serta keadilan terus dilakukan. Maka, upaya menghapus kemiskinan ekstrem, stunting, dan pembangunan daerah terpencil harus berhasil.

Oleh karena itu, seluruh tantangan global dan nasional harus kita jawab dengan tepat dan efektif. Peran APBN sangat penting dan strategis dalam mendukung, memfasilitasi, serta menentukan arah kebijakan ekonomi, sosial, dan daya saing pertahanan dan keamanan nasional.

Kebijakan fiskal ke depan dirancang dengan tujuan akselerasi target dan prioritas pembangunan nasional. Agenda transformasi ekonomi, termasuk hilirisasi sumber daya alam, baik hasil tambang maupun pangan, akan terus dilanjutkan.

Perlindungan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah, juga akan tetap menjadi fokus penting untuk menopang perbaikan struktural secara fundamental.

Hadirin yang saya muliakan, Bapak-Ibu serta Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Mempertimbangkan potensi perekonomian yang kita miliki, serta dengan tetap memperhitungkan

risiko-risiko yang akan datang, maka asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan RAPBN 2024 adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan sebesar 5,2 persen; Stabilitas ekonomi makro akan terus dijaga; Situasi kondusif dan damai pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 harus kita wujudkan; Implementasi beberapa undang-undang baru juga akan memberikan manfaat positif pada penguatan struktural.

Selanjutnya, inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 2,8 persen. Peran APBN akan tetap dioptimalkan untuk memitigasi tekanan inflasi, baik akibat perubahan iklim maupun gejolak eksternal. Koordinasi yang kuat antara anggota forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah akan terus dijaga.

Rata-rata nilai tukar Rupiah diperkirakan bergerak di sekitar Rp 15.000 per Dolar AS. Sementara, rata-rata suku bunga Surat Berharga Negara 10 tahun diprediksi pada level 6,7 persen. Koordinasi anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan akan selalu antisipatif dan responsif dalam menghadapi potensi gejolak eksternal.



Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada pada 80 Dolar AS per barel. Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 625 ribu barel per hari dan 1,03 juta barel setara minyak per hari.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati, yang saya muliakan,

Arsitektur APBN tahun 2024, harus mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan dan kesejahteraan secara optimal, mempercepat transformasi ekonomi, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, melindungi daya beli masyarakat dari guncangan, dan menjaga agar postur APBN tetap sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah dan panjang.

APBN tahun 2024 didesain untuk menjawab tantangan saat ini sekaligus di masa yang akan datang, maka kebijakan APBN tahun 2024 diarahkan untuk “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Upaya transformasi ekonomi, akan ditempuh melalui 2 strategi utama, yaitu strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah.

Pertama, strategi jangka pendek difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi.

Kedua, strategi jangka menengah difokuskan pada 5 agenda sebagai berikut:

Satu, mewujudkan sumber daya manusia unggul yang produktif, inovatif, sejahtera, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta reformasi sistem perlindungan sosial, termasuk penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Dua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Tiga, pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi.

Empat, meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, melalui hilirisasi sumber daya alam.

Lima, mendorong pengembangan ekonomi hijau.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya muliakan,

Untuk mewujudkan SDM unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 660,8 triliun atau 20 persen dari APBN, tercermin dari alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 237,3 triliun, Transfer ke Daerah sebesar Rp 346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp 77,0 triliun.

Kita harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi tidak boleh kita kendur. Agar sumber daya manusia kita produktif, inovatif, berdaya saing global, berintegritas, berakhlak mulia, dengan tetap menjaga jati diri budaya bangsa.



Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada: peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan distribusi guru dan sarana prasarana pendidikan; peningkatan kualitas PAUD; peningkatan akses pendidikan di semua jenjang pendidikan; peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan; penguatan konektivitas pendidikan vokasi dengan pasar kerja; serta perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia dan pengembangan riset dan inovasi.

Untuk menghadirkan SDM yang sehat dan produktif, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 186,4 triliun atau 5,6 persen dari APBN. Anggaran tersebut diarahkan untuk transformasi sistem kesehatan, mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan, menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal dari hulu ke hilir, mengaktifkan program JKN, serta mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14 persen di tahun 2024, yang dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi.

Untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pembangunan SDM jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 493,5 triliun.

Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, perbaikan basis data penerima antara lain melalui penguatan data registrasi sosial ekonomi, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.

Untuk mendorong produktivitas, mobilitas dan konektivitas, serta pemerataan yang berkeadilan, anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar Rp 422,7 triliun, yang diarahkan untuk: penguatan penyediaan pelayanan dasar; peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier; penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau, dan berkelanjutan; pemerataan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi; serta mendukung proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan IKN.

Strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp 108,8 triliun yang diprioritaskan untuk: peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan; peningkatan produksi pangan domestik; penguatan kelembagaan petani; dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani; percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan; pengembangan kawasan food estate; serta penguatan cadangan pangan nasional.

Untuk mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi, di antaranya dilakukan dengan mendorong hilirisasi sumber daya alam. Dukungan fiskal telah diberikan berupa insentif perpajakan dan berbagai insentif fiskal lainnya. Selama ini telah diberikan dukungan terhadap pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Hal ini untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi untuk penciptaan nilai tambah yang tinggi, perluasan kesempatan kerja, dan penggunaan energi yang ramah lingkungan

sehingga dapat menurunkan emisi, serta efisiensi subsidi energi.

Untuk menjaga agar pelaksanaan transformasi berjalan efektif, maka reformasi birokrasi harus terus diperkuat. Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dijalankan secara konsisten dan berhasil guna. Perbaikan kesejahteraan, tunjangan dan remunerasi ASN dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas.

RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah/TNI/Polri sebesar 8 persen dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12 persen, yang diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.

Industri pertahanan keamanan juga terus didorong agar maju dan mandiri dengan dukungan APBN, antara lain dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan Alutsista secara bertahap dengan didukung industri pertahanan di dalam negeri untuk memenuhi kekuatan pokok minimum.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya muliakan,

Pemerintah juga terus mendorong agar sinergi Pusat dan Daerah semakin baik. Untuk itu, kebijakan transfer ke daerah diarahkan semakin berkualitas dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Satu, harmonisasi belanja pusat dan daerah, terutama dalam upaya mendukung program prioritas nasional, termasuk transformasi ekonomi.

Dua, mempertajam pengelolaan dan penggunaan transfer ke daerah, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah yang inklusif.

Tiga, meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui penguatan perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, serta mendorong pembiayaan daerah sebagai sumber pendanaan di APBD.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Untuk menjalankan agenda pembangunan tersebut, pendapatan negara pada tahun 2024 didorong lebih optimal dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan kelestarian lingkungan.

Optimalisasi penerimaan perpajakan ditempuh dengan:

Pertama, menjaga efektivitas reformasi perpajakan untuk perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan dan penggalan potensi;

Kedua, implementasi sistem inti perpajakan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan;

Ketiga, implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan;

Keempat, pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional, serta memacu transformasi ekonomi.

Upaya peningkatan PNBPN terus dilakukan melalui perbaikan proses perencanaan dan pelaporan dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan.

Dengan kebijakan fiskal yang ekspansif, Pemerintah menjaga pembiayaan tetap prudent, tetap hati-hati, inovatif, dan berkelanjutan melalui: Pengembangan skema KPBU, termasuk penguatan peran BUMN, BLU, Lembaga Pengelola Investasi, dan Badan Penugasan Khusus; peningkatan efektivitas pembiayaan investasi, khususnya kepada BUMN dan BLU yang diarahkan untuk penyelesaian infrastruktur strategis Pusat dan Daerah, serta sinergi pembiayaan dan belanja; pembiayaan investasi untuk peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan Ultra Mikro; Pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih untuk menjaga stabilitas ekonomi dan antisipasi ketidakpastian; serta peningkatan pengelolaan manajemen kas yang

integratif untuk menjaga bantalan fiskal yang andal dan efisien.

Hadirin yang saya hormati sidang dewan, Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Untuk mendukung transformasi ekonomi, dan agenda pembangunan serta melindungi masyarakat dari goncangan, Postur APBN 2024 harus tetap sehat. Reformasi fiskal harus terus dilakukan secara komprehensif, baik optimalisasi pendapatan, melanjutkan penguatan belanja berkualitas, serta pembiayaan inovatif dan dikelola secara hati-hati.

Dengan mencermati tantangan dan agenda pembangunan serta upaya reformasi fiskal yang komprehensif, maka postur RAPBN 2024 sebagai berikut:

Pendapatan negara direncanakan sebesar Rp 2.781,3 triliun, yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan Rp 2.307,9 triliun dan PNBPN sebesar Rp 473,0 triliun, serta Hibah sebesar Rp 0,4 triliun.

Belanja negara dialokasikan sebesar Rp 3.304,1 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.446,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp 857,6 triliun.

Keseimbangan primer negatif Rp 25,5 triliun didorong bergerak menuju positif. Defisit anggaran sebesar 2,29 persen PDB atau sebesar Rp 522,8 triliun.

Dengan pengelolaan fiskal yang kuat, disertai dengan efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat, maka tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 diharapkan dapat ditekan dalam kisaran 5,0 persen hingga 5,7 persen, angka kemiskinan dalam rentang 6,5 persen hingga 7,5 persen, rasio gini dalam kisaran 0,374 hingga 0,377, serta Indeks Pembangunan Manusia dalam rentang 73,99 hingga 74,02.

Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105 sampai dengan 108 dan 107 sampai dengan 110.

Hadirin yang saya muliakan,

Demikianlah Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya. Besar harapan kami, pembahasan RAPBN tahun 2024 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia Maju, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan amanah seluruh rakyat Indonesia.

**Dirgahayu Republik Indonesia!
Dirgahayu Negeri Pancasila!
Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Terima kasih.**

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi
Wabarakaatuh.

Om Shanti Shanti Shanti Om, Namó Buddhaya.

Untuk informasi, yang saya pakai ini adalah baju adat dari Tanimbar, Provinsi Maluku.

Jakarta, 16 Agustus 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

JOKO WIDODO



HUT RI ke-78

Sejarah Kemerdekaan Cermin Kekuatan Komunikasi dan Telekomunikasi

Di masa ini, tibalah kita di era yang dimotori oleh teknologi dan konektivitas. Komitmen Pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo untuk membangun infrastruktur telekomunikasi yang merata, sesungguhnya senafas dengan semangat para pahlawan untuk menggapai kemerdekaan

Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-78 di lingkungan Kementerian Kominfo. Dalam pidatonya, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan, aktivitas komunikasi dan telekomunikasi memiliki andil dalam membangun sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia. Kekuatan komunikasi dan jangkauan telekomunikasi memungkinkan Proklamasi Kemerdekaan RI diketahui banyak orang dari berbagai penjuru.

Oleh karena itu, Menteri Budi Arie mengingatkan komitmen Kementerian Kominfo kepada Indonesia untuk menghubungkan wilayah-wilayah sampai pelosok negeri, memberdayakan ekosistem telekomunikasi, dan memastikan tiap warga negara memiliki akses yang sama atas informasi.

"Di masa ini, tibalah kita di era yang dimotori oleh teknologi dan konektivitas. Komitmen Pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo untuk membangun infrastruktur telekomunikasi yang merata, sesungguhnya senafas dengan semangat para pahlawan untuk menggapai kemerdekaan," tegasnya dalam Upacara Peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (17/08/2023).



Saya mengajak semua yang di pusat maupun di daerah, agar bangkit dengan energi baru, bangkit dengan komitmen baru. Mari kita nyalakan kembali semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia, sebagai nafas dalam membangun konektivitas ke seluruh penjuru negeri



Menteri Budi Arie Setiadi menjelaskan kekuatan komunikasi dan resonansi kata-kata untuk memantik harapan dan api kemerdekaan yang telah dilakukan oleh pahlawan kemerdekaan.

“Seperti Bung Karno dan Bung Hatta yang lantang menyerukan sebaait kalimat terpenting dalam 78 tahun sejarah Republik ini. Bung Tomo dengan berapi-api menggembelng semangat persatuan bangsa lewat orasinya di medan laga Surabaya. Aksi para pahlawan menggaungkan pesan penuh gelora pada masyarakat yang melintasi jarak, ialah bentuk kekuatan komunikasi,” jelasnya.

Menurut Menkominfo, semangat kemerdekaan makin dikobarkan pejuang sektor telekomunikasi, kala itu menggunakan teknologi radio. Siaran pembacaan teks proklamasi dikumandangkan setiap 30 menit ke penjuru negeri.

“Di tengah perjuangan kemerdekaan, ada upaya melawan penyegelan pemancar radio hingga pembredelan edaran berita kemerdekaan. Dan upaya itu berhasil menyebarkan proklamasi



kemerdekaan Indonesia dalam beberapa bahasa asing,” tuturnya.

Menteri Budi Arie menyatakan pelajaran dari sejarah bangsa menunjukkan kegigihan mencapai persatuan yang ditambah dengan komunikasi yang efektif, merupakan kekuatan untuk mengubah bangsa.

“Pejuang kemerdekaan sudah membuktikan bahwa bukan hal mustahil bagi masyarakat nusantara yang beragam, melaju ke arah tujuan yang sama,” tandasnya.



Ajak Sivitas Ciptakan Kedaulatan Ruang Digital

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menegaskan Kementerian Kominfo harus mampu berdiri tegak untuk kemajuan bangsa, menjadi ujung tombak pembangunan infrastruktur dan ekosistem digital yang merata.

“Sebagaimana para pahlawan mengambil langkah penuh keberanian menuju kemerdekaan, kita pun harus yakin untuk mengambil langkah menuju ruang digital berdaulat dan inklusif bagi semua,” ajaknya dalam Upacara Peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (17/08/2023).

Menurut Menteri Budi Arie, komitmen kolektif sivitas Kementerian Kominfo merupakan modal dasar kesuksesan yang perlu dijaga.

“Saya mengajak semua yang di pusat maupun di daerah, agar bangkit dengan energi baru, bangkit dengan komitmen baru. Mari kita nyalakan kembali semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia, sebagai nafas dalam membangun konektivitas ke seluruh penjuru negeri,” ungkapnya.

Saat ini Kementerian Kominfo memiliki tugas penting agar masyarakat Indonesia mendapatkan

manfaat optimal dari kemajuan teknologi yang terus berkembang.

“Apabila seabad lalu negara-negara Eropa dan Amerika Utara mendominasi kemajuan ekonomi global, kini menurut studi IMF, empat dari lima negara yang diproyeksikan menjadi raksasa ekonomi dunia di masa depan berasal

dari benua Asia. Indonesia menduduki salah satu posisi tersebut bersama dengan Tiongkok, India, dan Jepang,” ungkap Menkominfo.

Menteri Budi Arie menyatakan penguasaan terhadap teknologi digital menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan studi Bappenas, teknologi mampu

mendorong pertumbuhan ekonomi hingga sebesar 6%. Kontribusi ekonomi digital terhadap PDB nasional juga diprediksikan akan melonjak ke angka 20,7% pada tahun 2045.

“Data-data ini kembali menegaskan betapa strategisnya peran Kementerian Kominfo bagi pembangunan negeri ini,” tandasnya.



Oleh karena itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengajak seluruh sivitas bergerak maju menyongsong masa depan bangsa dengan ukiran karya Kominfo di dalamnya.

“Tidak ada alasan untuk pesimis. Semua harus bergerak maju dalam optimisme. Semua harus terus melaju, untuk Indonesia maju, seperti tema peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 78, hari ini,” tegasnya.

Upacara diikuti Wamenkominfo Nezar Patria, Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Fungsional di lingkungan Kementerian Kominfo, serta sivitas Kementerian Kominfo.





Tentang Baju Adat

Menkominfo dan Wakil Menkominfo

Kita dapat terus menghormati dan merayakan keragaman budaya kita yang menjadi salah satu kekuatan besar bangsa Indonesia. Ini adalah cara yang indah untuk merayakan keberagaman budaya kita yang luar biasa, sambil mengenang perjuangan para pahlawan kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Hari Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan momen yang penuh kebanggaan dan sukacita bagi warga negara Indonesia. Momen bersejarah ini umumnya dirayakan dengan berbagai perlombaan rakyat, dan juga melalui penampilan pakaian adat yang beragam dari berbagai suku dan etnis yang ada di Indonesia.

Saat memimpin Upacara Peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (17/08/2023), Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi mencuri perhatian dengan mengenakan baju adat suku Dayak, Kalimantan Barat, yang biasanya digunakan dalam berbagai upacara adat dan ritual suku tersebut. Penampilannya menggambarkan rasa cinta dan kebanggaan akan keberagaman budaya Indonesia yang kaya.



© 2023 BIRO HUMAS KEMENTERIAN KOMINFO

Pakaian khas suku Dayak untuk laki-laki terdiri dari berbagai komponen, yaitu:



Headdress (Hiasan Kepala)

Salah satu komponen yang paling mencolok dari baju adat suku Dayak adalah hiasan kepala yang beragam, bisa berupa topi tradisional dengan ornamen-ornamen yang indah atau bahkan mahkota dari bulu burung hantu yang sangat eksotis. Hiasan kepala ini mencerminkan status sosial dan kebangsawanan dalam budaya Dayak.



Baju Atasan

Baju atasan yang dikenakan Menteri Budi Arie Setiadi berupa tunik atau baju panjang dengan berbagai hiasan dan bordir yang indah. Warna-warna cerah dan ornamen-ornamen tradisional sering digunakan untuk menghiasi baju ini.



Rantai dan Hiasan Dada

Rantai dan hiasan dada adalah bagian penting dari baju adat suku Dayak. Mereka sering terbuat dari manik-manik atau potongan logam yang dirangkai dengan indah. Hiasan dada ini tidak hanya mempercantik pakaian, tetapi juga memiliki makna simbolis yang dalam dalam budaya Dayak.



Kain Tradisional

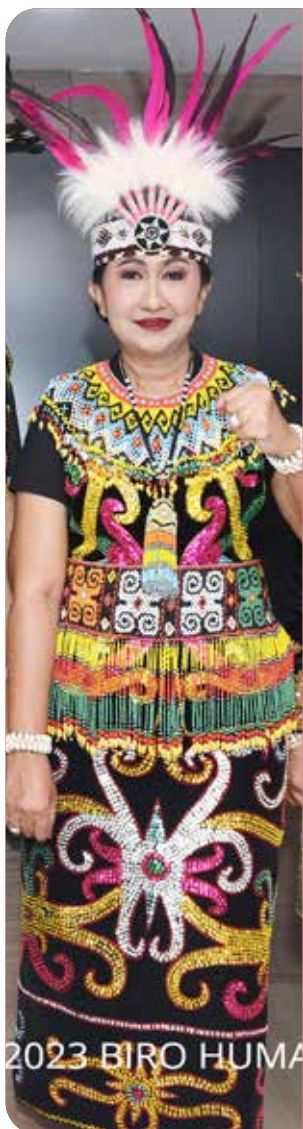
Kain tradisional juga merupakan bagian penting dari pakaian adat Dayak. Kain-kain ini seringkali dihiasi dengan motif-motif yang berasal dari alam sekitar, seperti daun, binatang, atau pola geometris yang rumit.



Aksesoris

Untuk melengkapi penampilan, Menteri Budi Arie Setiadi juga mengenakan aksesoris tambahan seperti gelang, kalung, dan cincin yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti kayu, tanduk, atau batu.

Sementara komponen pakaian khas suku Dayak untuk perempuan sedikit berbeda. Ada berbagai jenis baju adat Dayak yang dapat dikenakan oleh perempuan, tergantung pada suku dan daerah tertentu. Berikut adalah gambaran umum tentang baju adat khas suku Dayak untuk perempuan:



Tunggu atau Ngepan Iban

Salah satu suku Dayak terbesar adalah suku Iban, dan baju adat khas perempuan Iban disebut "Tunggu" atau "Ngepan Iban." Tunggu terdiri dari serangkaian pakaian yang indah dan penuh warna, termasuk blus, rok, dan hiasan kepala. Blus tradisional Iban terbuat dari kain sutra atau kain tenun tangan dengan hiasan sulaman yang rumit. Rok panjang dengan motif batik atau hiasan sulaman juga sering dipakai bersama blus.

Ngepan Kebayah atau Baju Kurung Dayak

Suku Dayak Ngaju memiliki baju adat perempuan yang dikenal sebagai "Ngepan Kebayah" atau "Baju Kurung Dayak." Baju ini terbuat dari kain tenun tradisional dengan warna-warna cerah dan motif khas suku Ngaju. Biasanya terdiri dari baju panjang dengan lengan pendek dan rok panjang. Pada bagian kepala, perempuan Dayak Ngaju sering mengenakan hiasan kepala yang disebut "Sanggul Berayun" yang terbuat dari kain dan perhiasan berkilauan.

Ngepan Bebinih atau Baju Adat Kenyah

Suku Dayak Kenyah memiliki baju adat khas perempuan yang dikenal sebagai "Ngepan Bebinih." Baju ini juga terbuat dari kain tenun tangan dengan warna-warna mencolok dan motif etnik yang unik. Terdiri dari blus dengan lengan panjang dan rok panjang, sering kali dipadukan dengan selendang khas. Perempuan Kenyah juga mengenakan perhiasan tradisional seperti kalung dan anting-anting yang terbuat dari bahan alami.

Ngepan Kebo-Keboan atau Baju Adat Dayak Modang

Suku Dayak Modang memiliki baju adat perempuan yang disebut "Ngepan Kebo-Keboan." Baju ini terkenal karena hiasan kepala yang besar dan unik yang terbuat dari tanduk kerbau atau bahan alami lainnya. Baju adat Dayak Modang juga terbuat dari kain tenun yang dihiasi dengan motif-motif geometris.



Wamenkominfo Kenakan Baju Adat Aceh Besar

Tak kalah menariknya, Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria beserta istri mengenakan baju adat khas Aceh Besar. Baju ini melambangkan budaya dari wilayah provinsi kelahiran sang Wakil Menteri, Aceh. Penampilan Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria dalam baju adat khas Aceh Besar adalah perpaduan harmonis antara tradisi dan modernitas.

Berikut adalah beberapa komponen utama dari baju adat khas Aceh Besar untuk laki-laki:



Sarung

Baju adat Aceh Besar dimulai dengan sarung panjang yang sering kali terbuat dari kain yang berkualitas tinggi dan berwarna cerah. Sarung ini merupakan salah satu elemen utama yang menciptakan penampilan yang megah dan tradisional.



Baju Atasan (Jaket atau Kemeja)

Di atas sarung, biasanya dipakai jaket atau kemeja yang indah dengan berbagai hiasan bordir tangan yang rumit. Warna-warna yang digunakan dalam baju atasan ini sering kali mencerminkan tradisi dan kekayaan alam Aceh, seperti biru laut, hijau sawah, atau kuning emas.



Songket

Salah satu ciri khas yang paling terkenal dari baju adat Aceh adalah songket. Songket adalah kain tenun tradisional yang dihiasi dengan benang emas atau perak, menciptakan pola-pola indah dan berkilau. Songket ini sering dipakai sebagai selendang yang melilit di sekitar pinggang atau pundak.



Hiasan Kepala

Bagian lain yang penting dalam penampilan ini adalah hiasan kepala. Meski dalam upacara kali ini Wamenkominfo mengenakan kopiah hitam, namun baju adat khas Aceh Besar identik dengan hiasan kepala yang khas, seperti kopiah atau tengkolok, yang diberi sentuhan khusus dengan motif dan warna-warna tradisional.



Aksesoris

Penampilan yang lengkap tidak bisa lepas dari aksesoris. Ini bisa mencakup kalung, gelang, cincin, dan keris sebagai lambang martabat dan kejantanan.

Sementara berikut adalah beberapa komponen baju Aceh Besar untuk perempuan:



Baju Kurung Aceh Besar

Salah satu pakaian adat paling ikonik dari Aceh Besar adalah "Baju Kurung Aceh Besar." Baju ini terdiri dari baju panjang dengan lengan panjang dan rok panjang. Bahan yang digunakan biasanya adalah sutra atau kain tenun yang berkualitas tinggi. Baju Kurung Aceh Besar dihiasi dengan sulaman tangan yang rumit, termasuk motif bunga, tumbuhan, dan geometris yang khas. Bagian lengan baju seringkali memiliki hiasan berbentuk bulan sabit yang disebut "tengkolok."

Selendang Meukeutop Aceh

Selendang adalah aksesoris penting dalam pakaian adat Aceh Besar. Selendang ini disebut "Selendang Meukeutop Aceh." Selendang tersebut seringkali dikenakan melilit leher dan diikat dengan indah, menambahkan keanggunan pada pakaian. Selendang ini juga sering dihiasi dengan hiasan sulaman yang serupa dengan motif pada baju.

Hiasan Kepala

Perempuan Aceh Besar biasanya mengenakan hiasan kepala yang disebut "Pucuk Rebung" atau "Cupak Meutub," yang terbuat dari kain sutra dan hiasan berkilauan. Pucuk Rebung dapat memiliki berbagai bentuk, seperti bulat atau berbentuk bunga yang indah.

Perhiasan

Untuk melengkapi pakaian adat Aceh Besar, perempuan Aceh sering mengenakan perhiasan berharga seperti anting-anting, kalung, dan gelang. Perhiasan ini bisa terbuat dari emas, perak, atau bahan-bahan alami, dan mereka menghiasi diri mereka dengan perhiasan ini selama acara-acara istimewa.

Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia terus menggali kekayaan budaya dari berbagai suku dan etnis yang ada di dalamnya. Melalui penampilan seperti yang ditunjukkan oleh Menteri Budi Arie Setiadi, kita dapat terus menghormati dan merayakan keragaman budaya kita yang menjadi salah satu kekuatan besar bangsa Indonesia. Ini adalah cara yang indah untuk merayakan keberagaman budaya kita yang luar biasa, sambil mengenang perjuangan para pahlawan kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.



Peran Radio dan Pos di Era Perjuangan Kemerdekaan

Begitu pentingnya peran radio dan pos hingga dijadikan peringatan hari besar nasional, atau yang dikenal dengan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi yang diperingati setiap tanggal 27 September.



Radio dan pos adalah dua saluran telekomunikasi yang sangat penting selama masa kemerdekaan suatu negara, termasuk dalam konteks perjuangan bangsa Indonesia. Keduanya memainkan peran kunci dalam mengoordinasikan perlawanan terhadap penjajah, menghubungkan pemerintah sementara dengan rakyat, dan memfasilitasi pertukaran informasi penting.

Meskipun tantangan teknis dan keamanan yang dihadapi, penggunaan radio dan pos sebagai saluran komunikasi sangat berperan dalam kesuksesan perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pembentukan negara yang merdeka.

Begitu pentingnya peran radio dan pos hingga dijadikan peringatan hari besar nasional, atau yang dikenal dengan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi yang diperingati setiap tanggal 27 September.

Di masa kemerdekaan, radio menjadi salah satu alat komunikasi terpenting bagi pejuang kemerdekaan Indonesia. Stasiun radio penyiaran, seperti Radio Republik Indonesia (RRI), digunakan untuk mengoordinasikan gerakan pasukan, memberikan perintah kepada komandan lapangan, dan mengirimkan pesan intelijen.

Radio juga digunakan oleh pemerintah sementara di bawah Soekarno sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan kebijakan, keputusan, dan informasi kepada rakyat Indonesia. Siaran radio ini membantu untuk memobilisasi dukungan rakyat dan membangun semangat kemerdekaan.

Selain fungsi praktisnya, radio juga digunakan untuk penyebaran informasi dan propaganda. Ini melibatkan penyiaran pesan-pesan yang mendukung perjuangan kemerdekaan, menggalang dukungan dari rakyat, dan memberikan pemahaman tentang tujuan perjuangan.

Namun tentunya, mengoperasikan radio pada masa itu bukanlah tugas yang mudah. Pasukan Belanda mencoba untuk memblokir atau mengintersepsi siaran radio pejuang kemerdekaan, sehingga pejuang harus bekerja keras untuk melindungi komunikasi mereka dan menggunakan kode-kode rahasia.

Tak hanya radio, pos turut berperan penting dalam penyebaran informasi keberhasilan pejuang kita merebut kemerdekaan.

Pos adalah saluran telekomunikasi utama yang digunakan untuk mengirim pesan fisik, seperti surat dan dokumen penting, dari satu tempat ke tempat lain. Ini sangat penting dalam pertukaran informasi antara pemimpin kemerdekaan, pasukan, dan wilayah yang berbeda.

Tak hanya itu, pos juga digunakan untuk mengirim pesan rahasia dan informasi yang perlu dijaga kerahasiaannya. Meskipun risiko pencurian pesan oleh pasukan Belanda, pos tetap menjadi cara yang relatif aman untuk mengirim informasi.

Pemerintah kemerdekaan Indonesia, seperti banyak negara yang merdeka, berinvestasi dalam infrastruktur pos. Mereka membangun kantor pos, rute pengiriman, dan staf yang diperlukan untuk memfasilitasi pertukaran pesan yang lebih efisien.





Suasana Upacara Peringatan HUT ke-78 RI dan Parade Busana di Lingkungan Kominfo

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menjadi Inspektur Upacara Peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Kamis (17/08/2023). Dalam upacara itu, Menkominfo mengenakan pakaian adat khas Suku Dayak, Kalimantan Barat.



Dalam pidatonya, Menkominfo menekankan bahwa aktivitas komunikasi dan telekomunikasi memiliki andil dalam membangun sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia. Kekuatan komunikasi dan jangkauan telekomunikasi tersebut memungkinkan Proklamasi Kemerdekaan RI diketahui banyak orang dari berbagai penjuru.



Sementara itu Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria dan istri mengenakan pakaian adat dari Meukeusah dari Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Upacara itu diikuti oleh jajaran Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Fungsional di lingkungan Kementerian Kominfo, serta perwakilan sivitas Kementerian Kominfo.





Upacara Peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Kamis (17/08/2023) turut dimeriahkan dengan parade dan lomba lomba busana adat.



Sebagai rangkaian Kominfo Karnaval 2023, acara yang digelar usai Upacara Peringatan HUT ke-78 RI itu disaksikan langsung Menkominfo Budi Arie Setiadi bersama Wamenkominfo Nezar Patria.







Targetkan Pemilih Muda, Kominfo Sosialisasikan Pemilihan Serentak 2024

oleh **Tim Informasi dan Komunikasi
Politik dan Pemerintahan**

Ayo Memilih untuk Indonesia!

Kualitas demokrasi Indonesia merupakan salah satu tolok ukur pembangunan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan. Dinamika yang terjadi di elit politik dan di tengah masyarakat masih menunjukkan banyak tantangan praktik demokrasi yang perlu dibenahi untuk meningkatkan kualitas bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia.

Berkaca pada pesta demokrasi Indonesia yang diselenggarakan melalui Pemilihan Umum, di antaranya Pemilihan Capres/Cawapres, Pemilihan

Kepala Daerah, hingga Pemilihan Legislatif, terungkap peredaran informasi yang sifatnya merusak, memecah belah, mengelompokkan, dan mengkotak-kotakkan masyarakat. Untuk itulah, Pemerintah perlu hadir dengan menghadirkan kembali, menegaskan, dan menguatkan karakter dan mental bangsa yang dijiwai falsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada 2024 mendatang, bangsa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi, yaitu Pemilu

serentak pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dan pemilihan umum legislatif (pileg) untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 dan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah (pilkada) di 516 kabupaten/kota dan 38 provinsi pada November 2024.

Ini menjadi kesempatan yang istimewa bagi bangsa dan negara Indonesia untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang berkualitas sehingga hasil yang positif selama lima tahun ke depan

dapat dinikmati seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Oleh karena itu, Pemerintah perlu meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu 2024, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan menciptakan kondisi yang kondusif di tengah-tengah masyarakat pada saat penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024, maka Pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 434 Ayat (2) huruf c dan d perlu untuk melaksanakan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan Pemilu dan melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu.

Pemilih Muda



Data KPU: Daftar Pemilih Tetap Berdasarkan Generasi dan Umur

Sesuai Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024 yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, jumlah total pemilih di Pemilu 2024 adalah

204.807.222. dari jumlah tersebut terbagi menjadi beberapa kategori berdasarkan generasi dan umur. Untuk Pre Boomer atau pemilih dengan tahun lahir sebelum 1945 sebanyak 1,74 persen, baby boomer (1946 – 1964) sebanyak 13,73 persen, generasi X atau gen X (1965-1980) sebanyak 28,07 persen, generasi milenial (1981-1996) sebanyak 33,60 persen serta generasi Z (1997-2009) sebanyak 22,85 persen.

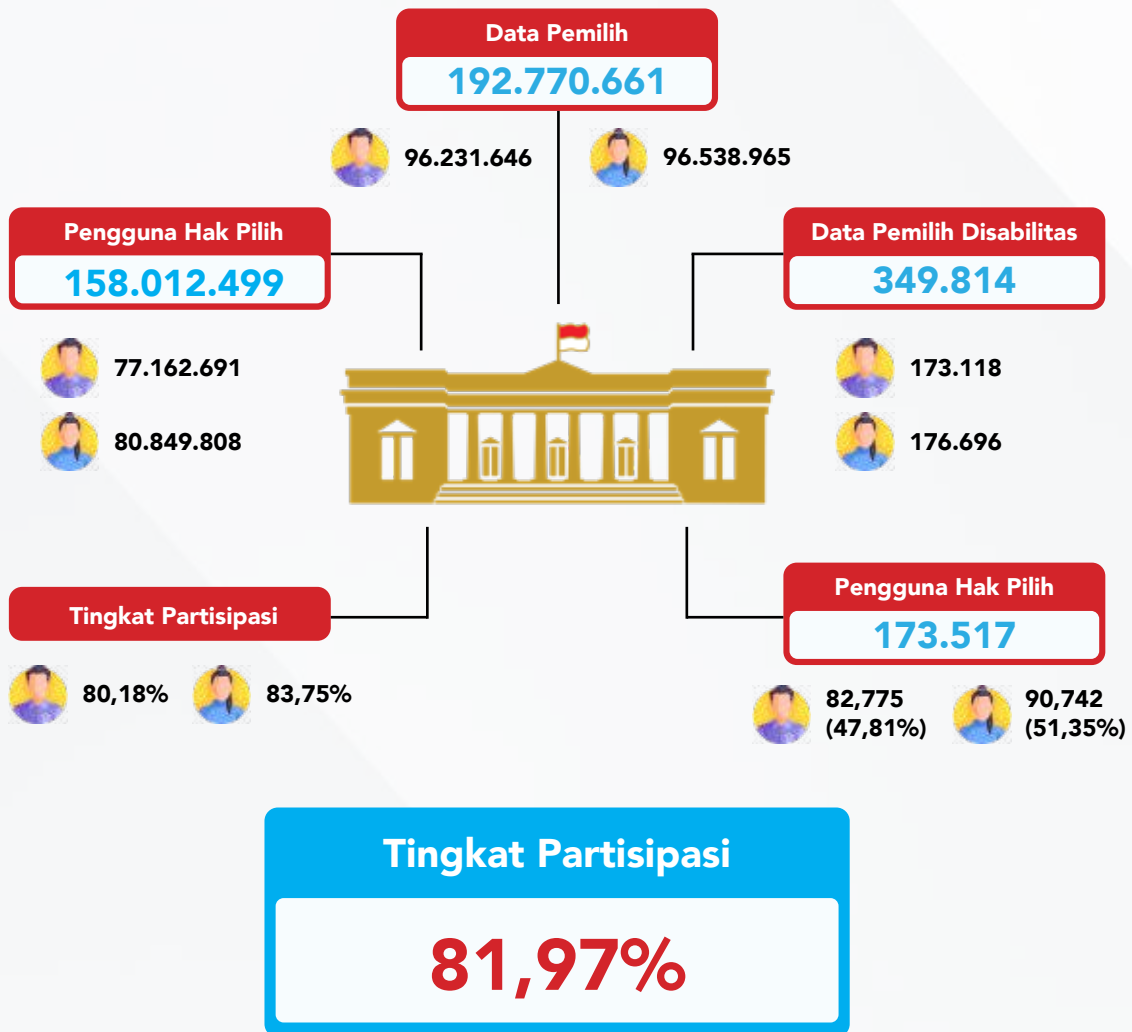
Dari prosentase pemilih berdasarkan generasi dan umur, pemilih pada Pemilu 2024 jelas didominasi oleh pemilih muda yakni yang berusia 17 – 40 tahun atau generasi Milenial dan generasi Z, dengan prosentase kurang lebih 52 persen dari total pemilih di Indonesia. Sudah barang tentu, banyaknya pemilih muda dalam Pemilu 2024 menjadi tantangan tersendiri baik bagi penyelenggara Pemilu di mana permasalahan yang ada saat ini adalah, selain tingkat pengetahuan dan pemahaman pemuda terhadap politik masih dinilai rendah, juga kemungkinan dihadapkan adanya maraknya hoaks yang bertebaran di media sosial.

Wilayah Partisipasi Rendah

Pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019 ditetapkan target nasional pemilih sekitar 77,5%. Faktanya partisipasi pada Pemilihan Presiden 2019 sekitar 81,97% dan pada Pemilihan Legislatif sekitar 81,69%. Oleh karena itu tren peningkatan partisipasi pemilih diharapkan dapat terus meningkat pada penyelenggaraan Pemilu selanjutnya (2024).

Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan, wilayah dengan Prosentase Partisipasi Masyarakat rendah antara lain, provinsi Sumatera Utara 78,03 persen, Sumatera Barat 78,98 persen, Provinsi Maluku 79,30 persen, Provinsi Kalimantan Utara 79,81 persen, dan Provinsi Kalimantan Tengah 79,95 persen.

Partisipasi Masyarakat Pemilu/Wakil Presiden



Data KPU: Laporan Partisipasi Masyarakat Pemilu Presiden 2019

**DATA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT PER PROVINSI
PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

No	Provinsi	DATA PEMILIH			PENGGUNA HAK PILIH			TINGKAT PARTISIPASI			JUMLAH SAH	JUMLAH TIDAK SAH
		L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL		
1	Aceh	1.734.675	1.789.999	3.524.674	1.384.406	1.503.854	2.888.260	79,81%	84,06%	81,96%	2.884.934	81.326
2	Sumatera Utara	4.839.043	4.946.962	9.786.005	5.671.807	1.964.419	7.636.226	75,88%	80,14%	78,03%	7.524.301	111.925
3	Sumatera Barat	1.836.907	1.881.290	3.718.197	1.379.099	1.557.620	2.936.719	75,07%	82,88%	78,50%	2.896.494	40.223
4	Riau	1.963.287	1.900.818	3.864.105	1.630.377	1.641.153	3.271.530	83,04%	86,38%	84,68%	3.224.000	47.530
5	Jambi	1.249.403	1.226.252	2.475.655	1.050.833	1.060.495	2.111.328	84,11%	86,48%	85,28%	2.062.858	48.470
6	Sumatera Selatan	2.965.679	2.911.896	5.877.575	2.462.795	2.475.790	4.938.585	83,04%	85,02%	84,02%	4.828.768	117.817
7	Bengkulu	788.242	690.866	1.399.108	597.606	598.743	1.196.349	84,38%	86,67%	85,51%	1.189.487	26.862
8	Lampung	3.181.750	2.972.187	6.153.937	2.469.210	2.426.375	4.895.585	79,67%	81,63%	80,60%	4.809.274	86.311
9	Kep. Bangka Belitung	475.784	456.785	932.569	405.721	401.170	806.891	85,27%	87,82%	86,52%	783.964	22.927
10	Kepulauan Riau	678.882	689.542	1.368.424	589.548	521.380	1.110.928	82,20%	85,52%	83,85%	1.076.201	34.665
11	DKI Jakarta	3.874.621	3.887.577	7.762.198	3.122.388	3.303.186	6.425.574	80,60%	84,97%	82,79%	6.345.684	79.890
12	Jawa Barat	16.727.453	16.549.454	33.276.907	13.439.811	14.037.060	27.476.871	80,34%	84,82%	82,57%	26.828.014	648.065
13	Jawa Tengah	13.901.368	13.995.534	27.896.902	10.715.340	11.661.125	22.376.465	77,08%	83,32%	80,21%	21.769.958	606.514
14	DY	1.330.152	1.491.762	2.731.874	1.179.545	1.269.934	2.449.479	88,70%	90,68%	89,67%	2.397.655	52.824
15	Jawa Timur	15.226.058	15.636.936	30.862.994	12.385.871	13.206.170	25.592.041	80,82%	84,19%	82,53%	24.672.915	838.326
16	Banten	4.180.146	4.012.331	8.192.477	3.364.982	3.426.184	6.791.166	82,07%	85,19%	83,71%	6.597.838	194.128
17	Bali	1.556.427	1.573.861	3.130.288	1.318.400	1.290.410	2.608.810	84,71%	82,30%	83,60%	2.564.472	52.338
18	NTB	1.880.915	1.886.338	3.767.253	1.443.725	1.596.961	3.040.686	80,17%	85,57%	82,91%	2.962.561	78.125
19	NTT	1.660.843	1.730.773	3.391.616	1.314.301	1.404.163	2.718.464	79,13%	81,13%	80,15%	2.674.569	43.895
20	Kalimantan Barat	1.879.884	1.887.275	3.767.159	1.524.177	1.505.732	3.029.909	81,08%	83,32%	82,17%	2.973.653	56.256
21	Kalimantan Tengah	903.610	850.234	1.753.844	714.994	686.704	1.401.698	79,18%	80,77%	79,95%	1.388.086	33.612
22	Kalimantan Selatan	1.436.959	1.432.287	2.869.246	1.174.701	1.207.402	2.382.103	81,75%	84,30%	83,02%	2.294.162	88.081
23	Kalimantan Timur	1.285.439	1.195.947	2.481.386	1.013.463	989.810	2.003.273	78,84%	82,76%	80,73%	1.965.288	37.993
24	Kalimantan Utara	236.229	213.879	450.108	184.527	174.714	359.241	78,11%	81,69%	79,81%	354.481	4.840
25	Sulawesi Utara	865.444	942.671	1.808.115	795.289	799.016	1.594.305	82,38%	84,76%	83,55%	1.580.209	34.096
26	Sulawesi Tengah	994.173	958.637	1.952.810	824.362	815.703	1.640.065	82,92%	85,09%	83,98%	1.621.242	38.821
27	Sulawesi Selatan	2.987.564	3.171.811	6.159.375	2.364.215	2.660.974	5.025.189	79,14%	83,88%	81,59%	4.926.984	98.295
28	Sulawesi Tenggara	880.459	863.880	1.744.339	691.815	731.571	1.423.386	80,64%	84,76%	82,70%	1.397.781	27.425
29	Gorontalo	495.117	407.684	902.801	356.091	366.989	723.080	87,96%	90,62%	89,56%	714.932	8.148
30	Sulawesi Barat	433.985	431.259	865.244	369.310	381.769	751.079	85,18%	88,52%	86,81%	738.932	12.547
31	Maluku	622.398	643.627	1.266.025	489.341	514.570	1.003.911	78,62%	79,95%	79,30%	892.387	11.534
32	Maluku Utara	405.031	398.952	803.983	311.778	333.836	645.614	81,91%	83,68%	82,79%	635.371	38.243
33	Papua	1.892.236	1.630.388	3.522.624	1.888.846	1.583.041	3.391.887	95,99%	95,92%	95,75%	3.333.065	58.822
34	Papua Barat	385.945	356.346	742.291	315.000	315.191	630.191	86,80%	88,45%	87,59%	637.729	12.462
	Luar Negeri	885.708	1.125.445	1.991.145	418.377	428.660	847.037	48,33%	38,09%	42,54%	778.280	68.757
	TOTAL	96.231.646	96.538.965	192.770.611	77.162.891	80.849.888	158.012.779	80,18%	83,75%	81,97%	154.257.601	3.754.985

*Berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 107/PL.01-R/PP/KPU/11/2019

Data KPU: Laporan Partisipasi Masyarakat Pemilu Presiden 2019

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Usman Kansong mengatakan, dalam dukungan sosialisasi Pemilihan Serentak 2014 diprioritaskan di wilayah atau Provinsi yang memang memiliki partisipasi pemilih rendah sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh KPU.

Sedangkan sebagai sasaran target komunikasi atau audiens pada sosialisasi Pemilihan Serentak 2024 adalah generasi muda atau pemilih muda. Oleh karena itu, lokasi-lokasi tempat penyelenggaraan sosialisasi juga disesuaikan dengan tempat yang memang sebagai camp-nya anak muda, salah satunya adalah di perguruan tinggi atau kampus.

"Sumatera Utara dan Sumatera Barat misalnya, data partisipasinya rendah. Kita gelar kegiatan untuk meningkatkan antusiasme dan partisipasi masyarakat, terutama generasi muda atau pemilih muda untuk turut aktif dengan menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Serentak 2024 mendatang," kata Dirjen IKP Usman di Jakarta, Jumat (28/07/2023).

"Kita berharap teman-teman gen Y dan gen Z bisa menjadi influencer, bisa menjadi agen menyampaikan temannya di universitas lain dan keluarganya. Semua ikut terlibat dalam peningkatan partisipasi pemilih di Pemilu 2024," ujarnya.

Dirjen IKP mengungkapkan, pihaknya juga gencar melakukan sosialisasi peningkatan partisipasi Pemilu 2024 melalui berbagai kanal seperti misalnya di media sosial, media online, media cetak, elektronik, media tatap muka, hingga media luar ruang.

Untuk lebih menjangkau target pemilih muda, sosialisasi juga melibatkan anak-anak muda sebagai narasumber seperti influencer, musisi, serta pegiat media sosial, selain dari penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kami selalu berkolaborasi tokoh anak muda, KPU dan Bawaslu. Bersama-bersama mengajak masyarakat, pemilih muda untuk jangan golput di Pemilihan Serentak 2024. Ayo Memilih Untuk Indonesia" pungkasnya.



“

Kebaya itu
melambangkan
karakter masyarakat
Indonesia: yang anggun,
yang lemah lembut,
yang sopan dan
bersahaja.

Presiden Joko Widodo

”

Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo membuka acara Istana Berkebaya yang digelar di Jalan Medan Merdeka Utara, tepat di depan Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu, 6 Agustus 2023. Acara tersebut digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia.









Salah satu menteri yang ikut serta adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mengaku senang namun juga gugup karena baru pertama kali berjalan di atas catwalk. "Senang sambil deg-degan soalnya belum pernah jadi peragawati. Hari ini saya bersama dengan beberapa ibu menteri dan ibu-ibu yang lainnya akan melakukan fashion show mengenakan kebaya dari Betawi, dari Jakarta," ujar Retno.





Rangkaian DEWG dan DEMM G20 di India

Bertolak ke India, Menkominfo Hadiri Pertemuan Tingkat Menteri G20 Bidang Digital

Setelah mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi bertolak ke India untuk menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri G20 bidang Digital atau Digital Economy Ministers Meeting (DEMM). Pertemuan ini akan berlangsung pada 19 Agustus 2023 di Taj West End, Bengaluru, India.

Menteri Budi Arie Setiadi menyatakan Kementerian Kominfo sebagai anggota Troika Presidensi G20 India menyampaikan pandangannya terhadap tiga isu prioritas yang akan menjadi bagian dari dokumen akhir hasil perundingan Kelompok Kerja Ekonomi Digital (Digital Economy Working Group - DEWG) yang telah berlangsung sejak Februari lalu.

"Pembahasan kita di Pertemuan DEWG Presidensi G20 India menyangkut tiga hal, pertama, soal infrastruktur digital publik, kedua, kecakapan dan kemampuan sumberdaya manusia. Dan ketiga cyber security," tuturnya di Jakarta Pusat, Kamis (17/08/2023).



Pembahasan mengenai ketiga isu prioritas tersebut juga merupakan perwujudan upaya Indonesia dalam mengakselerasi transformasi digital nasional.

"Jadi ini mencakup semua, untuk mendukung transformasi digital Indonesia dan juga menuju Visi Indonesia Digital 2045," jelas Menteri Budi Arie.

Menurutnya, dukungan dan sikap Pemerintah Indonesia terhadap semua isu yang dibahas pada DEWG Presidensi G20 India akan memberikan manfaat sebagaimana yang menjadi tujuan negara Anggota G20.

"Kita sudah persiapan menjelang DEMM, termasuk sikap pemerintah kita juga. Intinya, kita terus memberikan dukungan pada semua kesepakatan yang saling menguntungkan bagi negara-negara Anggota G20," tandasnya.



Usulkan Pendekatan Fleksibel dan Komprehensif

Pertemuan Menteri Ekonomi Digital Negara Anggota G20 membahas tiga isu prioritas usulan Presidensi G20 India, yaitu Digital Public Infrastructure (DPI) for Digital Inclusion and Innovation; Building Safety, Security, Resilience and Trust in the Digital Economy; dan Digital Skilling for Building a Global Future Ready Workforce.

Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan Indonesia mengapresiasi usulan Presidensi G20 India. Bahkan, Menteri Budi Arie menekankan pendekatan fleksibilitas untuk implementasi DPI dan peningkatan keamanan digital serta keterampilan digital yang komprehensif.

“Sebagai delegasi sekaligus Anggota Troika, Indonesia menyampaikan intervensi terhadap masing-masing isu prioritas,” ujarnya dalam Digital Economy Minister Meeting (DEMM) Digital Economy Working Group (DEWG) G20 di Taj West End, Bengaluru, India, Sabtu (19/08/2023).

Pembahasan kita di Pertemuan DEWG Presidensi G20 India menyangkut tiga hal, pertama, soal infrastruktur digital publik, kedua, kecakapan dan kemampuan sumberdaya manusia. Dan ketiga cyber security

Dalam isu prioritas pertama, Indonesia menyampaikan masukan mengenai ruang fleksibilitas bagi setiap negara untuk mengembangkan DPI sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan tingkat perkembangan ekonomi masing-masing.

“Indonesia juga mendorong pemanfaatan DPI yang difokuskan di dalam negeri, tanpa menutup kemungkinan untuk mengembangkan DPI yang bersifat lintas negara,” ungkap Menteri Budi Arie.

Berkaitan dengan isu prioritas kedua, Indonesia menyadari keamanan menjadi komponen penting dalam pengembangan ekonomi digital. Menkominfo menyatakan isu ini juga dibahas dalam Presidensi G20 Indonesia 2022.

“Indonesia mengumpulkan praktik dari banyak Anggota G20 mengenai keamanan digital yang menjadi faktor kunci dalam mendukung kelangsungan bisnis, terutama bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu, isu yang krusial bagi Indonesia adalah perlindungan untuk anak dalam ruang digital,” tandasnya.



Mengenai isu ketiga, Menteri Budi Arie menyatakan Indonesia menyambut baik usulan Presidensi India untuk melakukan perbandingan kecakapan digital antar negara. Menurutnya, Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan program pengembangan kecakapan digital secara komprehensif.

“Seluruh program penyiapan SDM digital dilakukan dengan berkolaborasi bersama berbagai pemangku kepentingan dari akademisi, pelaku industri, organisasi masyarakat sipil, serta instansi pemerintah terkait,” ungkapnya.

Dalam DEMM DEG Presidensi G20 India, selain Menkominfo Budi Arie Setiadi, hadir tujuh menteri dari negara Anggota G20 beserta 5 menteri negara undangan. Mereka membahas dan memberikan usulan untuk dokumen akhir dari rangkaian pertemuan Digital Economy Working Group yang akan menjadi bahan pembahasan Pemimpin Negara G20.





Kita selalu mau dan harus bekerja sama dengan semua negara, karena semua negara ini punya pengalaman atau best practice yang mana kita bisa saling bertukar pikiran. Kita perlu saling belajar dari beberapa negara tersebut, yang nantinya akan kita kembangkan pembahasannya



Temui Menteri Jepang dan India

Di sela-sela rangkaian kegiatan DEWG dan DEMM Presidensi G20 India, Menkominfo juga menggelar pertemuan bilateral antara Menteri bidang digital Jepang dan India.

Menurutnya, pemerintah Republik Indonesia berupaya meningkatkan kerja sama dengan berbagai negara untuk memperkuat komitmen mengenai tiga isu prioritas DEWG Presidensi G20 India tahun 2023. Menkominfo Budi Arie Setiadi mengharapkan lewat pertemuan bilateral Indonesia dapat membicarakan isu-isu strategis terkait dengan pembahasan fokus pada DEWG.

“Tadi kami melaksanakan pertemuan bilateral dengan Menteri Transformasi Digital Jepang Taro Kono didampingi Menteri Urusan Dalam Negeri Tsuge Yoshifumi. Juga, dengan Menteri Elektronik dan Teknologi Informasi India Ashwini Vaishnaw sebagai tuan rumah. Sebagai anggota Troika Presidensi G20 India kami menyampaikan pandangan terhadap isu-isu strategis termasuk tiga isu prioritas yang menjadi bagian dari dokumen hasil kesepakatan DEWG,” jelasnya di sela-sela pertemuan bilateral, di Taj West End, Bengaluru, India, Jumat (18/08/2023).



Menurut Menteri Budi Arie, dalam pertemuan itu, masing-masing pihak membahas isu mengenai ekonomi digital. "Sangat baik hubungan kita dengan mereka secara bilateral maupun multilateral. Kami membicarakan beberapa isu terkait ekonomi digital," ungkapnya.

Menkominfo mengharapkan pertemuan tersebut dapat mempererat hubungan baik antar negara Anggota G20 dan tentunya memfasilitasi kesamaan pandangan terhadap isu-isu prioritas DEWG Presidensi India tahun ini.

"Yang utama adalah mengenai Infrastruktur Publik Digital, kemampuan digital untuk mempersiapkan angkatan kerja, dan yang terakhir soal Keamanan di sektor Ekonomi Digital." Lebih jelasnya.

Selain dengan Menteri dari Jepang dan India, Menkominfo menyatakan India akan membuka peluang kerja sama dengan seluruh negara anggota G20. Menurut Menteri Budi Arie, pertemuan bilateral yang berlangsung hari ini merupakan ajang bagi Kementerian Kominfo saling bertukar pengalaman.

"Kita selalu mau dan harus bekerja sama dengan semua negara, karena semua negara ini punya pengalaman atau best practice yang mana kita bisa saling bertukar pikiran. Kita perlu saling belajar dari beberapa negara tersebut, yang nantinya akan kita kembangkan pembahasannya," ujarnya.

Dalam pertemuan bilateral, Menkominfo Budi Arie Setiadi didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba; Staf Khusus Menkominfo, Sarwoto Atmosutarno; Kepala Pusat Kelembagaan Internasional, Ichwan Nasution; serta Konsul Jenderal Republik Indonesia di Mumbai Eddy Wardoyo.

Dorong G20 Optimalkan Kolaborasi

Menteri Budi Arie Setiadi menilai upaya Presidensi India mendorong tukar pengetahuan dalam infrastruktur digital publik menjadi penting karena ekonomi digital bisa menciptakan peluang baru pertumbuhan dan kemakmuran serta tantangan baru.

"Seperti akses infrastruktur dan konektivitas digital yang tidak merata, ancaman digital dan serangan siber, serta kurangnya keterampilan dan literasi digital yang diperlukan guna memahami penggunaan teknologi digital dengan cara yang bertanggung jawab dan produktif," ujarnya.

Sebagai anggota Troika, Indonesia mendukung inisiatif Presidensi G20 India untuk membahas isu keamanan sektor ekonomi digital. Menkominfo menyatakan hal itu dapat memastikan keselamatan dan keamanan yang mendukung ketahanan ekonomi digital.

"Ke depan, pertukaran lebih lanjut akan dilakukan tentang bagaimana kita sebagai komunitas global mengatasi berbagai tantangan dan masalah pada teknologi baru," tandasnya.

Menurut Menteri Budi Arie, Indonesia juga mendukung diskusi lebih lanjut tentang pengembangan keterampilan digital. Bahkan, Pemerintah Indonesia mendukung investasi dalam pelatihan dan pendidikan yang memainkan peran penting guna memungkinkan masyarakat dapat memanfaatkan peluang dari transformasi digital saat ini.

"Hal ini dilakukan guna membekali masyarakat menghadapi tantangan di masa depan akibat kemunculan teknologi baru," tegasnya.

DEMM Presidensi G20 India merupakan kelanjutan dari pertemuan DEWG. Acara itu dihadiri negara Anggota G20, 9 perwakilan negara undangan, dan 7 perwakilan organisasi Internasional.

Dalam DEMM masing-masing negara menyampaikan pandangan tiga isu prioritas yang menjadi bagian dalam dokumen akhir dari rangkaian Pertemuan DEWG yaitu, Digital Public Infrastructure (DPI) for Digital Inclusion and Innovation; Building Safety, Security, Resilience and Trust in the Digital Economy; dan Digital Skilling for Building a Global Future Ready Workforce.

Bincang Santai dengan Mahasiswa dan Perwakilan Startup Indonesia

Di tengah kunjungan ke Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Bidang Digital G20 (G20 Digital Economy Ministers' Meeting / DEMM) Tahun 2023 yang diselenggarakan di Bengaluru, India, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi bersama Ibu Dina Budi Arie menyempatkan diri untuk menyapa perwakilan mahasiswa Indonesia yang sedang menimba ilmu di "Silicon Valley-nya India".

Dalam kesempatan berbincang dengan para mahasiswa, Menteri Kominfo menyatakan bahwa Indonesia terus berupaya mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di seluruh penjuru Nusantara guna memperkecil kesenjangan digital. Selain membangun infrastruktur digital yang merata,

Menteri Budi juga menegaskan bahwa Indonesia terus berupaya untuk memajukan kedaulatan digital bangsa dan membutuhkan talenta-talenta muda yang memiliki keahlian di bidang teknologi agar dapat membawa perubahan positif sekaligus mendukung perwujudan Visi Indonesia Maju 2045. Hal-hal ini juga selaras dengan pembahasan 3 (tiga) isu prioritas yang dirundingkan oleh para negara anggota G20 dalam forum Kelompok Kerja Ekonomi Digital G20 (G20 Digital Economy Working Group / DEWG) Tahun 2023 dalam serangkaian pertemuan di India.

"Pembahasan dalam Pertemuan Digital Economy Working Group (DEWG) kali ini terkait dengan teknologi, yang terdiri dari tiga isu prioritas, yaitu Digital Public Infrastructure, Security in Digital Economy, dan Digital Skilling," ungkapnya dalam Bincang-bincang Menkominfo Budi Arie Setiadi beserta Ibu Dina Budi Arie dengan Mahasiswa Indonesia dan Perwakilan Start-up Indonesia di India, di JW Marriot Hotel, Bangalore, India, Jumat (18/08/2023).



Pengetahuan dan kemampuan teman-teman yang akan membuat negara kita tidak ketinggalan dengan negara-negara lain, mudah-mudahan transfer knowledge dan teknologi dari teman-teman, bisa mendorong kreativitas anak muda untuk berkembang di negeri sendiri





Menkominfo mengajak para pelajar Indonesia yang tengah mengenyam pendidikan di India untuk tak lupa kembali pulang ke Tanah Air jika telah menyelesaikan pendidikannya. Menurutnya, lapangan kerja di Indonesia masih terbuka lebar, dan banyak perusahaan kini sedang membutuhkan talenta di bidang teknologi.

“Jadi setelah selesai pendidikan, pulanglah kembali ke Indonesia nantinya. Buat teman-teman yang mendapatkan beasiswa Kominfo, harus lulus tepat waktu, semangat terus kembali ke Indonesia. Tularkan ilmu yang sudah kalian dapat di India,” ajaknya.

Dalam kesempatan yang sama, Ibu Dina Budi Arie menyatakan pelajar Indonesia di India merupakan salah satu pemilik masa depan Indonesia 2045. Oleh karena itu, Ibu Dina Budi Arie mengajak generasi muda Indonesia yang tengah mengenyam pendidikan di India untuk nantinya bisa kembali pulang ke tanah air guna membangun masa depan Indonesia maju.

“Pengetahuan dan kemampuan teman-teman yang akan membuat negara kita tidak ketinggalan dengan negara-negara lain, mudah-mudahan transfer knowledge dan teknologi dari teman-teman, bisa mendorong kreativitas anak muda untuk berkembang di negeri sendiri,” harapnya.



Di samping menemui para mahasiswa, Menteri Budi dan Ibu Dina turut menemui perwakilan perusahaan-perusahaan rintisan/startups yang sedang menghadiri G20 Digital Innovation Alliance 2023 (DIA), salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Presidensi G20 India tahun 2023 dan merupakan terusan dari G20 Digital Innovation Network (DIN) yang diinisiasi Indonesia tahun lalu.

“Saya lihat ada beberapa teman startups yang jauh-jauh datang dari Indonesia untuk mengikuti G20 Digital Innovation Alliance. Saya berharap teman-teman dapat menunjukkan kemajuan Indonesia dalam pengembangan teknologi digital sekaligus unjuk kebolehan pemecahan masalah dengan solusi berbasis teknologi digital,” tuturnya.

Delri Tekankan Kesamaan Pandangan dalam Keberagaman

Setelah menyelesaikan tiga pertemuan Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau G20 Digital Economy Working Group (DEWG) Meeting sebelumnya, Presidensi G20 India menyelenggarakan Pertemuan DEWG keempat pada tanggal 16 s.d. 17 Agustus 2023.

Dalam pertemuan ini, Ketua Delegasi Republik Indonesia (Delri) Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Mira Tayyiba didampingi Kepala Pusat Kelembagaan Internasional Setjen Kementerian Kominfo, Ichwan Nasution.

Sebagai anggota Troika, Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Presidensi G20 India atas pembahasan tiga isu prioritas yang tertuang

dalam rancangan dokumen akhir dari pertemuan, yaitu (i) Digital Public Infrastructure (DPI) for Digital Inclusion and Innovation, (ii) Building a Safe, Secure, and Resilient Digital Economy, dan (iii) Digital Skilling for Building a Global Future Ready Workforce.

“Kami yakin semua isu prioritas yang dibahas merupakan isu yang relevan terutama dalam upaya kita menghubungkan 2,7 miliar penduduk dunia yang belum terkoneksi dengan internet. Lebih lanjut, kami juga mendorong kerja sama global dalam mencapai transformasi digital dan ekonomi digital yang lebih inklusif, memberdayakan, dan tangguh, serta dapat berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs),” tutur Sekjen Kementerian Kominfo pada hari pertama Pertemuan DEWG keempat di Taj West End, Bangaluru, India, Rabu (16/08/2023).

Intervensi Indonesia pada Isu Prioritas DPI

Dalam sesi perundingan isu prioritas pertama, Ketua Delri menekankan arti penting kesamaan pandangan dalam memfasilitasi keragaman dan tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda, serta kebijakan setiap negara Anggota G20.

“Kami yakin implementasi dan utilisasi platform seperti DPI harus disesuaikan dengan keragaman negara Anggota G20. Oleh karena itu, kerangka DPI yang diusulkan harus bersifat inklusif dan memperhatikan kondisi serta tingkat perkembangan ekonomi masing-masing negara,” tegas Sekjen Mira Tayyiba.

Indonesia juga mendorong Presidensi G20 India untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif terhadap seluruh capaian (deliverables) yang diusulkan. Hal ini menjadi komponen penting dalam mencapai hasil yang lebih tajam, inklusif, dan dapat diimplementasikan.

“Saya berharap Pertemuan DEWG keempat dan Pertemuan Tingkat Menteri G20 bidang Digital dalam beberapa hari ke depan akan menghasilkan hasil yang lebih tajam, inklusif dan dapat diimplementasikan,” ungkap Mira Tayyiba.

Pertemuan ini menjadi pertemuan terakhir dari rangkaian pertemuan DEWG. Setelahnya, para Menteri negara Anggota G20 akan hadir dalam Pertemuan Tingkat Menteri G20 bidang Digital (Digital Economy Ministers Meeting) pada 19 Agustus 2023.





Kominfo Karnaval 2023



Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi membuka Kominfo Karnaval 2023 di Lapangan Anantakupa, Kantor Kementerian Kominfo Jakarta Pusat, Senin (14/8/2023).

Kominfo Karnaval 2023 merupakan rangkaian peringatan ulang tahun ke-78 Republik Indonesia dan 22 Tahun Kementerian Kominfo.

Sejalan dengan tema peringatan ke-78 Kemerdekaan RI, "Terus Melaju untuk Indonesia Maju", Menkominfo meminta agar setiap sivitas memiliki semangat untuk terus bekerja membangun dunia komunikasi dan informatika di Indonesia.





**Kick Off Kominfo
Karnaval 2023**

Menandai dibukanya Kominfo Karnaval 2023, digelar pertandingan ekshibisi untuk beberapa cabang olah raga yang akan dipertandingkan selama bulan Agustus 2023. Di antaranya adalah cabor Bola Voli kategori putra dan putri, serta cabor Basket 3on3 kategori putra dan putri.







Buka Kominfo Karnaval, Menkominfo Ajak Sivitas Melaju untuk Indonesia Maju

Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar Kominfo Karnaval 2023 dalam rangkaian peringatan ulang tahun ke-78 Republik Indonesia dan 22 Tahun Kementerian Kominfo.

Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan momentum HUT RI menjadi wahana menjalin persatuan dan kebersamaan. Oleh karena itu, Menteri Budi Arie mengajak seluruh sivitas bekerja bersama memajukan Indonesia.

"Jadi kita terus bergerak untuk Indonesia maju. Dan kebersamaan kita hari ini di Karnaval Kominfo ini supaya kita lebih bersatu sebagai keluarga besar Kementerian Komunikasi dan Informatika," ujarnya saat memberikan sambutan dalam Kominfo Karnaval Edisi HUT ke-78 Republik Indonesia dan Peringatan 22 Tahun Kementerian Kominfo, di Lapangan Anantakupa, Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (14/08/ 2023).

Sejalan dengan tema peringatan ke-78 Kemerdekaan RI, "Terus Melaju untuk Indonesia Maju", Menkominfo meminta agar setiap sivitas memiliki semangat untuk terus bekerja membangun dunia komunikasi dan informatika di Indonesia.

"Tetap semangat. Selamat bertanding, semoga yang menang happy, yang kalah juga happy. Inilah peringatan 17 Agustus, tidak ada yang menang, maupun yang kalah. Harus tetap bergembira karena kegembiraan adalah semangat kita bersama," tandasnya.

Semangat Tak Kunjung Padam



Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba menyatakan rangkaian acara Kominfo Karnaval akan menjadi ajang selebrasi dan momen spesial berkumpulnya keluarga besar Kementerian Kominfo bersama Menteri Kominfo dan Wakil Menteri Kominfo.

"Dengan pejabat eselon I yang baru membawa angin segar yang makin mengobarkan api semangat Kementerian Kominfo yang tak kunjung padam sebagaimana kita berkumpul di Lapangan Anantakupa pagi ini yaitu api yang tak kunjung padam," ujarnya.

Rangkaian lomba kemerdekaan 17 Agustus diikuti 350 orang peserta mewakili satuan kerja

di lingkungan Kementerian Kominfo. Acara dimeriahkan oleh pertunjukan band dan berbagai perlombaan seperti balap karung, balap balon, lari kelereng, tarik tambang, balap bata, hias tumpeng, gim dan e-Sport.

Menurut Sekjen Mira Tayyiba, rangkaian Kominfo Karnaval akan berlanjut dengan Kominfo Karnaval edisi ulang tahun ke-22 Kementerian Kominfo September 2023.

"Melalui rangkaian kegiatan Kominfo Karnaval tahun ini semangat kebersamaan, kolaborasi dan bahu membahu antara sivitas Kementerian Kominfo," tegasnya.



Kamu Ikuti, Kamu Terinformasi

Ikuti Sosial Media Kominfo

-  @Kemenkominfo
-  @kemkominfo
-  Kemkominfo
-  Kemkominfo TV
-  @kemkominfo

Program Menarik Kominfo

- Miss Lambe Hoaks VS Fact Boy
- TokTok Kominfo
- Kominfopedia
- Netizen Bertanya Kominfo Menjawab
- Kominfo News

Retweet | Share | Like | Follow | Subscribe | Love | Comment

Dirgahayu Ke-78 Republik Indonesia!

“

Merdeka adalah bagaimana
cara kita memaknainya.
Berjuang dan berkorban
adalah langkah dalam
menggapai kemerdekaan.

**Terus Melaju Untuk
Indonesia Maju!**

Budi Arie Setiadi
Menkominfo RI

